

**DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
POLITIK UANG DALAM PEMILU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

REINDY LASA

NIM :21310179

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reirdy Lasa

Nim : 21310179

Alamat : Jl. Timor Raya, RT 013/Rw005 Kelurahan
Tarus, Kecamatan Kupang Tengah

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini Adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 3 September 2025



REINDY LASA
NIM : 21310179

PENGESAHAN

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Umbu Lily Pekuwalli, SH., M.Hum

NUPTK. 4644736637130062

Pembimbing II



Jeremia Alexander Wewo, SH., MH

NUPTK. 6137770671130343



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG FAKULTAS
HUKUM**

**Jl. Adisucipto - Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG-NTT -8500 Telp (0380)
Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id**

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu, 8 november 2025 (dua ribu dua puluh lima), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum
2. Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H
3. Soleman Kette S.H., M.Hum

TANDA TANGAN



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK 7862752653130072

MOTTO

*Tetapi Kamu Ini, Kuatkanlah Hatimu, Jangan Lemah Semangatmu, Karena Ada
Upah Bagi Usahamu*

(2 Tawarikh 15:7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Segala hormat dan syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan, hikmat dan pengharapan yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup saya.
2. Orang tua tercinta bapak David Seprianus Lasa dan mama Yeane Sulastri Ratu A.Md. Akun., yang telah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai, terima kasih untuk segalanya, karena berhasil membuat anak laki-lakinya menempuh Pendidikan sampai sarjana.
3. Juga kepada saudari terkasih kakak Mendy Ivana Lasa S.Farm., dan kedua adik tercinta Arimel Lasa dan Cheril Lasa yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan doa tulus dalam setiap langkah perjuangan ini.
4. Juga tidak lupa sahabat saya Juliandro Putra Boeky S.H., yang telah mejadi teman seperjuangan, penyemangat, dan pendukung setia dalam suka maupun duka.
5. Teman-teman Fakultas hukum 2021 terlebih khusus Adagium (kelas B Reguler) , Para senior maupun junior FH, yang sudah menjadi teman diskusi dan ruang belajar bagi penulis serta banyak memberi dukungan motivasi kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Ibu Fransina Pattiruhu, SH.M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Uumbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum., dan Dosen Pembimbing II Bapak Jeremia Alexander Wewo, SH., M.H yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PENGESAHAN	
BERITA ACARA	
MOTTO.....	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
ABSTRAK.....	
ABSTRACT.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	
D. Keaslian Penelitian.....	
E. Metode Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilu	
1. Pengertian Pemilu (Pemilihan Umum).....	
2. Jenis- Jenis Pemilu (Pemilihan Umum)	
3. Pengertian tindak pidana	
4. Landasan Hukum Pengaturan Pemilu (emilihan Umum).....	
B. Tinjauan Umum Politik Uang	
1. Pengertian Politik Uang.....	
2. Jenis-Jenis Politik Uang	
C. Proses Penegakan Hukum Politik Uang.....	
1. Pengawasan dan Pencegahan Awal	
2. Laporan dan Temuan	
3. Penelusuran dan Klarifikasi.....	

4. Penanganan Pelanggaran	
5. Proses Sidang dan Putusan	
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	
A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data putusan pengadilan tentang tindak pidana politik uang.....	
---	--

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu” yang dilatarbelakangi oleh maraknya praktik politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Politik uang dianggap sebagai akar dari korupsi politik karena melahirkan pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan rakyat. Walaupun telah diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, praktik politik uang masih terus terjadi, bahkan menimbulkan perdebatan terkait konsistensi putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup : (1) motif pelaku melakukan tindak pidana politik uang ; (2) modus pelaku dalam melakukan tindak pidana politik uang ; serta (3) akibat hukum yang diterima oleh pelaku berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis motif, modus, serta akibat hukum dari praktik politik uang sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menelaah putusan hakim pada lima perkara tindak pidana politik uang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku dalam tindak pidana politik uang umumnya dilatarbelakangi oleh ambisi memperoleh jabatan politik dan kepentingan kelompok tertentu. Modus yang digunakan bervariasi, mulai dari pembagian uang tunai, pemberian barang, hingga janji fasilitas kepada pemilih. Akibat hukum bagi pelaku adalah pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, meskipun dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan hakim sering kali lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hal ini menimbulkan persoalan terkait efek jera dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Indonesia.

Kata kunci: *Politik Uang, Penegakan Hukum, Pemilu, Hukum Pidana*

ABSTRACT

This research, entitled “Description of Law Enforcement of Political Money Crimes in Elections”, is motivated by the widespread practice of money politics in general and local elections in Indonesia. Money politics is considered the root of political corruption because it produces leaders who prioritize personal or group interests over the public interest. Although it has been regulated and prohibited in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections, money politics continues to occur, raising debates regarding the consistency of judges’ decisions in imposing criminal sanctions. The research problems focus on: (1) the motives of perpetrators in committing money politics crimes; (2) the modus operandi employed in committing money politics; and (3) the legal consequences imposed on perpetrators under the Election Law and the Regional Election Law. The purpose of this study is to identify and analyze the motives, modus operandi, and legal consequences of money politics practices as reflected in court decisions. This study uses normative legal research with a descriptive approach. Research data were obtained from primary legal materials in the form of legislation and court rulings, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and previous studies. The analysis technique employed is qualitative by examining judges’ decisions in five cases of money politics handled by District Courts and High Courts. The results show that the perpetrators’ motives are generally driven by political ambition and group interests. The modus operandi varies, ranging from distributing cash, giving goods, to promising facilities to voters. The legal consequences imposed are imprisonment and fines as regulated in the Election and Regional Election Laws. However, in practice, the sentences handed down by judges are often lighter than the prosecutors’ demands, raising concerns regarding deterrence and the effectiveness of law enforcement against money politics in Indonesia.

Keywords: *Money Politics, Law Enforcement, Elections, Criminal Law*